

MEMAHAMI

PANCASILA

DISAMPAIKAN PADA SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO
DISELENGGARAKAN OLEH :
BALMON SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA

KEC.MUARA BADAQ KAB.KUTAI K ARTANEGARA
27-29 MEI 2013

MAHENDRA PUTRA KURNIA

SEJARAH PANCASILA

- ❖ APA ITU PANCASILA?
- ❖ MENGAPA PANCASILA LAHIR?
- ❖ KAPAN PANCASILA LAHIR?
- ❖ 29 MEI 1945 ATAU 1 JUNI 1945?
- ❖ SIAPA PENEMU PANCASILA?
- ❖ M.YAMIN ATAU SOEKARNO
ATAU SIAPA?

PANCASILA

SECARA BAHASA

PANCA = LIMA

SILA = DASAR, PEDOMAN, ADAB,
ADAT, AKHLAK, ETIK, MORAL, NILAI

ISTILAH PANCASILA

Catatan sejarah tentang Budha telah dikenal “sila” yang berarti moralitas.

Mengandung maksud melindungi orang lain dari penderitaan melalui fungsi “sila” yaitu:

1. Menghindari membunuh
2. Menghindari mencuri
3. Menghindari berbuat asusila
4. Menghindari berkata bohong
5. Menghindari minum yang memabukkan

Zaman Majapahit (\pm abad XIV) istilah Pancasila sudah dikenal yang terdapat dalam buku Negarakertagama (Mpu Prapanca) dan buku Sutasoma (Mpu Tantular).

Pancasila = “berbatu sendi yang kelima” atau “pelaksanaan kesusilaan yang lima” atau dikenal dengan istilah “Pancasila Krama”, yaitu:

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras

MENGAPA PANCASILA LAHIR?

Pertanyaan Mr. Radjiman Wedyodiningrat pada saat sidang BPUPKI 29 Mei 1945 tentang apa "dasar negara" atau dasar apa negara Indonesia itu nantinya akan didirikan?

KAPAN PANCASILA "HBD"?

SIAPA PENEMU PANCASILA?

MASA TAHUN 1920an

- Berbagai kreativitas intelektual dan usaha mensintesisikan aneka ideologi dan gugus pergerakan dalam rangka membentuk blok nasional bersama demi mencapai kemerdekaan
- Pergerakan dan upaya mahasiswa Indonesia di Belanda.
- Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

Sidang Pleno I BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945)

29 Mei 1945

M.Yamin dalam pidatonya mengusulkan 5 dasar negara

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Pidato Soekarno 1 Juni 1945

- Dasar negara Indonesia merdeka sebagai *Philosophische Gronslag* yaitu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya bagi berdirinya negara Indonesia.
- Usulan **Tiga** konsep dasar negara

Pidato Soekarno 1 Juni 1945

A. LIMA SILA/PANCASILA

1. KEBANGSAAN INDONESIA
2. INTERNASIONALISME ATAU PERIKEMANUSIAAN
3. MUFAKAT ATAU DEMOKRASI
4. KESEJAHTERAAN SOSIAL
5. KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN

Menurut Soekarno 5 unsur di atas mengakar kuat dalam jiwa
bangsa Indonesia

Pidato Soekarno 1 Juni 1945

B. TIGA SILA/ TRISILA

1. SOCIO-NASIONALISME (perasaan dari sila Kebangsaan dan Internasionalisme)
2. SOCIO-DEMOKRASI (perasaan dari sila kerakyatan dan kesejahteraan)
3. Ke-Tuhanan

Pidato Soekarno 1 Juni 1945

C. SATU SILA/ EKASILA

"GOTONG ROYONG"

**KAPAN PANCASILA LAHIR?
29 MEI 1945 ATAU 1 JUNI
1945?**

**SIAPA PENEMUNYA? YAMIN
ATAU SOEKARNO?**

- ISTILAH PANCASILA MEMANG SECARA RESMI MUNCUL SAAT PIDATO SOEKARNO 1 JUNI 1945.
- AKAN TETAPI SECARA SUBSTANSIAL, BERDASAR PEMAHAMAN PANCASILA SAAT INI DAN BERDASAR FILOSOFI “HIRARKIS PIRAMIDAL”, DIMANA SILA PERTAMA MENJADI DASAR SILA KEDUA, SILA KEDUA MENJADI DASAR SILA KETIGA... DST. PANCASILA PIDATO SOEKARNO KURANG SEJALAN DENGAN FILOSOFI HIRARKIS PIRAMIDAL.
- APALAGI SOEKARNO JUGA MENGUSULKAN TRISILA DAN EKASILA

**LANTAS SIAPA YANG
MENEMUKAN PANCASILA?**

PANCASILA SEBAGAI KARYA BERSAMA

- Sidang Pleno 1 BPUPKI berakhir tanpa kesepakatan tentang dasar negara dan juga UUD.
- Sidang ditutup dengan kesepakatan membentuk Panitia 8 dengan tugas menginventarisir usulan yang muncul pada Sidang Pleno I BPUPKI untuk dibahas pada sidang berikutnya (10-17 Juli 1945)
- Panitia 8 (Soekarno (Ketua), M.Hatta, M.Yamin, A.Maramis, M.Sutardjo Kartohadikoesoemo, Oto Iskandardinata (gol.kebangsaan), Ki Bagoes Hadikoesoemo dan KH Wachid Hasjim (gol. Islam).

PANCASILA SEBAGAI KARYA BERSAMA

- Soekarno melakukan berbagai inisiatif di luar kerangka formalitas, diantaranya membentuk **Panitia 9** yang bertugas untuk menyusun rancangan Pembukaan UUD NRI yang di dalamnya termuat dasar negara.
- Panitia 9 (Soekarno (Ketua), M.Hatta, M.Yamin, A.Maramis, Soebardjo (gol.kebangsaan), KH Wachid Hasjim, KH Kahar Moezakir, H.Agoes Salim dan R.Abikusno Tjokrosoejoso (gol. Islam).

PANCASILA SEBAGAI KARYA BERSAMA

- Panitia 9 berhasil merumuskan dan menyetujui rancangan pembukaan UUD pada 22 Juni 1945 yang dinamakan “**Piagam Jakarta**” (nantinya akan menjadi **Pembukaan UUD 1945**).
- Piagam Jakarta menghasilkan rumusan dasar negara (Pancasila), yaitu: **Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

PANCASILA SEBAGAI KARYA BERSAMA

- Perdebatan intelektual antara golongan nasionalis dengan golongan Islam, terutama untuk sila yang pertama.
- Perdebatan masih berlangsung sampai akhirnya Indonesia memproklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945

PANCASILA SEBAGAI KARYA BERSAMA

18 Agustus 1945, sidang PPKI mengesahkan Piagam Jakarta dengan:

1. Mengganti Sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. “Mukaddimah” diganti “Pembukaan”.
3. Kata “rasa” pada sila kedua dan kata-kata “dan dengan mewujudkan” pada sila kelima dihilangkan.

PANCASILA SEBAGAI KARYA BERSAMA

Sehingga Panca Sila dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PANCASILA SEBAGAI KARYA BERSAMA

- SEJAK 18 AGUSTUS 1945 PANCASILA DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI DASAR (FALSAFAH) NEGARA, PANDANGAN HIDUP, IDEOLOGI NASIONAL, DAN LIGATUR (PEMERSATU).
- PANCASILA ADALAH DASAR STATIS YANG MEMPERSATUKAN SEKALIGUS BINTANG PENUNTUN YANG DINAMIS, YANG MENGARAHKAN BANGSA DALAM MENCAPAI TUJUANNYA.
- PANCASILA MERUPAKAN SUMBER JATI DIRI, KEPRIBADIAN, MORALITAS, DAN HALUAN KESELAMATAN BANGSA.

PANCASILA SEBAGAI KARYA BERSAMA

- Pancasila sebagai **basis moralitas** dan **haluan kebangsaan-kenegaraan**
- Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.

POKOK MORALITAS & HALUAN KEBANGSAAN-KENEGARAAAN

PERTAMA:

- Nilai-nilai Ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas bagi kehidupan bernegara.
- Indonesia bukan negara sekuler ekstrem atau negara agama, justru negara diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama.

POKOK MORALITAS & HALUAN KEBANGSAAN-KENEGARAAAN

KEDUA:

- ⦿ Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia merupakan fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.
- ⦿ Eksternalisasi (bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia).
- ⦿ Internalisasi (mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri).
- ⦿ Eksternalisasi dan internalisasi yang berlandaskan adil dan beradab.

POKOK MORALITAS & HALUAN KEBANGSAAN-KENEGARAAAN

KETIGA:

- Aktualisasi nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat secara internal sebelum menjangkau pergaulan dunia.
- Persatuan mengatasi paham golongan dan perseorangan.
- Persatuan dalam keragaman, keragaman dalam persatuan (Bhineka Tunggal Ika).

POKOK MORALITAS & HALUAN KEBANGSAAN-KENEGARAAAN

KEEMPAT:

- ⦿ Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita kebangsaan dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- ⦿ Demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat dalam kerangka musyawarah mufakat.
- ⦿ Musyawarah mufatakat, keputusan tidak didikte oleh mayoritas, elite politik dan pengusaha, melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

POKOK MORALITAS & HALUAN KEBANGSAAN-KENEGARAAAN

KELIMA:

- ⦿ Nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial.
- ⦿ Perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.
- ⦿ Keseimbangan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani.
- ⦿ Keseimbangan antara peran manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
- ⦿ Keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

POKOK MORALITAS & HALUAN KEBANGSAAN-KENEGARAAAN

KELIMA:

- ⦿ Kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif berdasarkan asas kekeluargaan
- ⦿ Cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- ⦿ Dalam perancangan ekonomi, negara memiliki posisi penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, penyediaan, dan rekayasa sosial, serta penyediaan jaminan sosial.

KETUHANAN YANG MAHA ESA



- ⦿ Ketuhanan YME meliputi dan menjiwai sila-sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- ⦿ Moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi ketuhanan dan keberlangsungan suatu negara-bangsa
- ⦿ Komunitas agama dituntut untuk lebih mampu menempatkan diri dan menampilkan ajaran agama sebagai pembawa kebaikan untuk semua
- ⦿ Tujuan negara secara duniawi dan ukhrowi

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



- Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah **diliputi dan dijiwai** oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Kemanusiaan yang adil dan beradab **meliputi dan menjiwai** sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Visi bangsa Indonesia yang mengandung banyak **nilai manusiawi** sebagai pegangan menghadapi tantangan globalisasi.
- **Memuliakan HAM** dalam kehidupan nasional dan internasional.
- Perpaduan **visi global** dan **kearifan lokal**.



Persatuan Indonesia

- Persatuan Indonesia **diliputi dan dijiwai** oleh sila-sila Ketuhanan YME serta Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Persatuan Indonesia **meliputi dan menjiwai** kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Komitmen **kebangsaan** Indonesia.
- Ekspresi **rasa syukur** atas desain Tuhan yang menciptakan perbedaan, dengan menjunjung tinggi **kesetaraan kemuliaan** manusia, dengan mengembangkan sikap positif terhadap **kemajemukan bangsa**, melalui perwujudan **demokrasi permusyawaratan** yang **berorientasi keadilan sosial**.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan



- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan **diliputi dan dijiwai** oleh sila-sila Ketuhanan YME serta Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia.
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan **meliputi dan menjiwai** keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Demokrasi dalam alam Pancasila dilandasi oleh **nilai-nilai teosentris** dan nilai-nilai antroposentris yang **memuliakan nilai-nilai kemanusiaan**, yang **menghargai perbedaan** berlandaskan semangat **kesetaraan** dan **persaudaraan** dengan mewujudkan suatu **keadilan sosial** bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu, harus diberi akses ke dalam proses pengambilan keputusan (**partisipasi masyarakat**).
- Keterwakilan rakyat yang menjunjung **etika politik** dan semangat kekeluargaan serta merepresentasikan kedaulatan rakyat.



Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia **diliputi dan dijiwai** sila-sila Ketuhanan YME serta Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- **Prinsip keadilan** adalah inti dari moral Ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat.
- **Welfare state**, negara dapat mengelola kekayaan bersama untuk kemakmuran rakyat, mencegah kapitalisme asing/lokal, mengembangkan dan memperkuat semangat “**tolong-menolong**” (kooperasi), kesempatan bagi semua warga negara untuk mengembangkan diri, perluasan kesempatan serta memperoleh jaminan sosial.

AJARAN PANCASILA

- ⦿ Warisan pendiri bangsa sebagai dasar **falsafah** dan **pandangan hidup** negara yang **visioner** dan **tahan banting** (*durable*)
- ⦿ Bertrand Russel: sintesis kreatif antara Declaration of American Independence (representasi ideologi kapitalis) dengan Manifesto Komunis (representasi ideologi komunis).
- ⦿ Rutgers: "dari semua negara-negara di Asia Tenggara, Indonesialah yang dalam konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada semua revolusi melawan penjajahan. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam daripada revolusi-revolusi itu.
- ⦿ Tetap kokoh sebagai dasar negara.
- ⦿ Ideologi terbuka.

BAGAIMANA MEMPERDALAM PEMAHAMAN,
PENGHAYATAN, DAN KEPERCAYAAN AKAN
KEUTAMAAN NILAI-NILAI YANG
TERKANDUNG DALAM SETIAP SILA
PANCASILA DAN
KESALINGTERKAITANNYA SATU SAMA
LAIN UNTUK KEMUDIAN DIAMALKAN
SECARA KONSISTEN DI SEGALA LAPIS DAN
BIDANG KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA?

PERMASALAHAN

KUNTOWIJOYO

=

RADIKALISASI PANCASILA

=

revolusi gagasan demi membuat Pancasila
tegar, efektif, dan menjadi petunjuk
bagaimana negara ini ditatakelola dengan
benar

=

Pancasila lebih operasional dalam
kehidupan dan ketatanegaraan, dan sanggup
memenuhi kebutuhan praktis atau
pragmatis dan bersifat fungsional.

RADIKALISASI PANCASILA

1. Mengembalikan Pancasila sebagai **ideologi negara**.
2. Mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai **ilmu**.
3. Mengusahakan Pancasila mempunyai **konsistensi** dengan produk perundang-undangan, koherensi antar sila dan **korespondensi** dengan realitas sosial.

RADIKALISASI PANCASILA

4. Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal.
5. Menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

MEMBUMIKAN PANCASILA DARI IDEALITAS KE REALITAS

Kita perlu **menghayati fitrah** (semangat asal) **bernegara** seperti yang dipesankan dan dicontohkan oleh para pendiri bangsa.

Fitrah Pertama: semangat **ketakwaan** kepada Tuhan.

Fitrah Kedua: semangat **kekeluargaan**.

Fitrah Ketiga: semangat **keikhlasan**.

Fitrah Keempat: semangat **pengabdian** dan **tanggung jawab**.

Fitrah Kelima: semangat
menghasilkan yang **terbaik**.

Fitrah Keenam: semangat
keadilan dan **kemanusiaan**.

Fitrah Ketujuh: semangat
kejuangan.

- Fitrah Dasar kehidupan bernegara itu perlu dihidupkan sebagai **tenaga batin** dan **prasyarat moralitas** yang dapat mengangkat marwah bangsa dari kerendahannya.
- Pancasila **harus hidup dalam realita**, tidak hanya jadi retorika atau verbalisme di pentas politik.
- Mulai **sekarang** dan mulai dari **diri sendiri**.

DAFTAR RUJUKAN DAN BACAAN

- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna; historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Mahfud, MD, 2009, “Pancasila Sebagai Hasil Karya Bersama Dan Milik Bersama”, Kongres Pancasila; Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Sekjend Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Ria Casmi Arrsa, 2011, *Deideologi Pancasila (Analisis Kritis Perspektif Sejarah Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, UB Press, Malang.
- Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.



**JAYALAH
INDONESIA**